

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Budi Winarno, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Ctk. Pertama, Media Pressindo, Yogyakarta, 2004.
- Lutfi Effendi, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*, Ctk. Pertama, Banyumedia, Malang, 2004.
- Mohammad Isnanini Sadali, Hafidz Wibisono, *Permukiman Kumuh Di Pinggiran Kota (Kasus di Pinggiran Kota Yogyakarta)*, dikutip dari Prof. Dr. Su Ritohardoyo, M.A., Prof. Dr. M. Baiquni, M.A., Prof. Dr. R. Rijanta, M.Sc., *Perkembangan Permukiman dan Pembangunan Wilayah di Indonesia*, Cetakan Pertama, Badan Penerbit Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2020.
- Soerjono Soekamto dan Sri Mamudja, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Ctk. Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.

Jurnal :

- Akhmad Fauzi, Alex Oxtavianus, “Pengukuran Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia”, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 15, No. 1, Juni 2014, hlm. 68-83.
- Bachtiar Hassan Miraza, “Peran Kebijakan Publik dalam Perencanaan Wilayah”, *Jurnal Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Wahana Hijau*, Vol. 1, No. 2, Desember 2005, hlm. 47.
- Burhanuddin, “Integrasi Ekonomi dan Lingkungan Hidup dalam Pembangunan yang Berkelanjutan”, *Jurnal EduTech*, Vol. 2, No. 1, Maret 2016, hlm. 11-17.
- Erlangga Putranindya, Sutomo Kahar, Arwan Putra W, “Evaluasi Tata Letak Bangunan Terhadap Garis Sempadan Jalan Di Kawasan Central Business District kota Semarang”, *Jurnal Geodesi Undip*, Vol. 3, No. 2, April 2014, hlm. 94
- H. Cecep Cahya Supena, “Tinjauan Yuridis Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah Tentang Garis Sempadan”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 7, No. 1, April 2020, hlm. 2.

- Hotma L Purba, “Analisis Kinerja Struktur Pada Bangunan Bertingkat Beraturan dan Ketidak Beraturan Horizontal Sesuai SNI 03-1726-2012, *Jurnal Teknik Sipil dan Lingkungan*, Vol. 2, No. 4, Desember, 2014, hlm. 710.
- I. Gusti Agus Alit, Doni Saputra, I. Ketut Sudiarta, Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati, “Pengendalian Pemanfaatan Ruang Melalui Izin Mendirikan Bangunan Sebagai Instrumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buleleng”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 14, Kertha Negara, 2018, hlm. 3.
- Imam Ropii, “Pola Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Dalam Otonomi Daerah (Konsepsi dan Dinamikanya)”, *Jurnal Maksigama Jurnal Hukum*, Vol. 9, No. 1, November 2015, hlm. 44.
- Muhdar Junef, “Penegakan Hukum Dalam Rangka Penataan Ruang Guna Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 17, No. 4, 2017, hlm. 379.
- Neti Sunarti, “Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Melaksanakan Program Pembangunan”, *Jurnal ilmiah ilmu pemerintahan Moderat (Modern dan Demokrasi)*, Vol. 2, No. 2, Mei 2016, hlm. 791.
- Tatik Sri Djatmiati, *Prinsip Izin Usaha Industri di Indonesia*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2004.
- Yulinda Rosa, “Persepsi Terhadap Standar, Pedoman dan Manual (SPM) Dalam Penerapan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan Gedung”, *Jurnal Standardisasi*, Vol. 15, No. 3, November 2013, hlm. 188.
- Yuyun Andriyani, Nur Achmad Akbar Lintang Wibowo, Awiluddin, “Penegakan Hukum Terhadap Bangunan Ruko Yang Melanggar Garis Sempadan Bangunan”, *Jurnal Lex Suprema*, Vol. III, No. 1, Maret 2021, hlm. 643.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Bangunan Gedung mencabut Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021-2041

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 118 Tahun 2021 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Yogyakarta Tahun 2021-2041

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Penjabaran Rencana Pola Ruang dan Ketentuan Intensitas Pemanfaatan ruang

Internet :

Hendriyan, “Buka Data 560 Hotel Bodong ke Publik” dalam <https://radarjogja.jawapos.com/jogja-utama/2022/01/04/buka-data-560-hotel-bodong-ke-publik/.htm>, Akses 11 Juni 2022, Jam 12.30.

Ahmad Rozak, “Wacana Hak Angket Kasus Swiss Bell Hotel Mengemuka” dalam <https://nasdemjogja.id/2021/12/13/wacana-hak-angket-kasus-swiss-bell-hotel-mengemuka/.htm>, Akses 15 Juni 2022, Jam 09.00.

Hasil Wawancara :

Wawancara dengan Bapak Moh. Nur Faiq, S.T. bidang jabatan fungsional di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta, Kamis, 21 Juli 2022, jam 09.00 WIB.

Wawancara dengan Bapak Suwariyanto staff seksi perizinan dan nonperizinan bidang pelayanan terpadu di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta, Rabu, 20 Juli 2022, Jam 11.00 WIB.

Wawancara dengan Bapak Pamungkas, S.T., M.T. Kepala seksi pengaturan tata ruang bidang pengaturan dan pembinaan tata ruang di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta, Senin, 18 Juli 2022, Jam 13.00 WIB.